

PERAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH, INSENTIF FISKAL, DAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN INDUSTRI HALAL REGIONAL KOTA MAKASSAR

Nadia¹, Sinar², Desy Rahmawati Anwar³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Pelita Buana Buana

Email: nadiaaja280207@gmail.com¹, sinarbtg6@gmail.com², desyrahmawatianwar@gmail.com³

ABSTRAK

Industri halal merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia memiliki peluang signifikan dalam pengembangan industri halal, khususnya melalui dukungan kebijakan pemerintah daerah, insentif fiskal, dan akses pembiayaan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah daerah, insentif fiskal, dan akses pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan industri halal regional di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap pelaku UMKM dan industri halal di Kota Makassar. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh parsial dan simultan antarvariabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah, insentif fiskal, dan akses pembiayaan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan industri halal regional, baik secara parsial maupun simultan. Akses pembiayaan syariah ditemukan sebagai variabel yang memiliki pengaruh paling dominan. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan publik, instrumen fiskal, dan sistem keuangan syariah dalam membangun ekosistem industri halal yang berkelanjutan. Dari perspektif ekonomi syariah, hasil penelitian ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah dalam mewujudkan kemaslahatan, perlindungan harta, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pengembangan industri halal regional yang inklusif dan berdaya saing.

Kata Kunci: Industri Halal, Kebijakan Pemerintah Daerah, Insentif Fiskal, Pembiayaan Syariah, Pertumbuhan Ekonomi Regional

ABSTRAK

The halal industry is one of the strategic sectors in value-based Islamic economic development with substantial potential to stimulate regional economic growth. Makassar City, as an economic growth center in Eastern Indonesia, holds significant opportunities for halal industry development through the support of local government policies, fiscal incentives, and access to Islamic financing. This study aims to examine the effects of local government policies, fiscal incentives, and access to Islamic financing on the growth of the regional halal industry in Makassar City. A quantitative approach was employed using a survey method involving halal MSMEs and industry actors in Makassar. The data were analyzed using multiple linear regression to assess both partial and simultaneous effects among the research variables. The findings reveal that local government policies, fiscal incentives, and access to Islamic financing have a positive and significant impact on the growth of the regional halal industry, both individually and collectively. Access to Islamic financing emerged as the most dominant influencing factor. These results underscore the importance of synergy between public policy, fiscal instruments, and the Islamic financial system in fostering a sustainable halal industry ecosystem. From the perspective of Islamic economics, the findings align with the principles of maqashid al-shariah in promoting public welfare, safeguarding wealth, and enhancing societal well-being. This study is expected to serve as a reference for local governments and stakeholders in formulating inclusive and competitive strategies for regional halal industry development.

Keywords: *halal industry, local government policy, fiscal incentives, Islamic financing, regional economic growth.*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri halal global menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Laporan *State of the Global Islamic Economy* (DinarStandard, 2023) mencatat belanja produk dan jasa halal dunia telah mencapai lebih dari USD 2,2 triliun pada tahun 2022 dan diproyeksikan terus meningkat seiring meningkatnya populasi Muslim dan kesadaran konsumen terhadap sertifikasi halal. Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekonomi halal, termasuk subsektor makanan halal, fashion, pariwisata halal, kosmetik halal, hingga industri farmasi dan keuangan syariah. Pemerintah pusat telah mendorong percepatan ekosistem halal melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024, menjadikan penguatan industri halal sebagai prioritas nasional. Hal ini menunjukkan bahwa peluang penguatan industri halal tidak hanya berada pada level nasional, tetapi juga sangat bergantung pada inisiatif pemerintah daerah sebagai pelaksana utama kebijakan di wilayahnya.

Di tingkat regional, Kota Makassar memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI). Data BPS Kota Makassar (2023) menunjukkan bahwa kontribusi sektor perdagangan, industri pengolahan, dan UMKM terhadap PDRB mencapai lebih dari 38%, dengan pertumbuhan UMKM yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Dalam konteks industri halal, Makassar menjadi salah satu kota dengan potensi besar, tercermin dari meningkatnya jumlah UMKM yang mengajukan sertifikasi halal serta berkembangnya layanan perbankan syariah. Namun, meskipun potensinya besar, kontribusi industri halal di Makassar terhadap perekonomian regional masih belum optimal. Salah satu faktor utama adalah belum maksimalnya peran kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pelaku usaha masuk ke rantai nilai industri halal secara terstruktur.

Kebijakan pemerintah daerah memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem kondusif bagi pertumbuhan industri halal. Namun, beberapa kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan halal di daerah sering kali tidak terintegrasi, minim koordinasi, dan tidak memiliki roadmap yang jelas (Hidayat & Siradj, 2020). Di Makassar, meskipun telah terdapat program pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM, banyak pelaku UMKM menghadapi hambatan administratif, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan fasilitas pendukung seperti laboratorium halal, pelatihan standar halal, dan pusat inkubasi bisnis syariah. Selain itu, dukungan regulasi daerah belum secara optimal terarah pada pengembangan klaster industri halal yang komprehensif.

Selain kebijakan daerah, insentif fiskal merupakan instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Insentif fiskal seperti pengurangan pajak daerah, keringanan retribusi, hingga dukungan fasilitas produksi dapat meningkatkan daya saing UMKM halal. Namun, penelitian menunjukkan bahwa akses UMKM terhadap insentif fiskal masih terbatas karena kurangnya informasi, persyaratan administrasi yang kompleks, serta minimnya program fiskal yang secara spesifik ditujukan untuk industri halal (Setiawan & Rani, 2022). Di Makassar, insentif

fiskal bagi UMKM masih bersifat umum dan belum terarah pada penguatan sektor halal, sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan industri halal regional.

Akses pembiayaan syariah menjadi faktor krusial lain dalam mendukung pertumbuhan industri halal. Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, BMT, dan koperasi syariah telah berkembang di Makassar, namun banyak UMKM halal yang belum mampu mengakses pembiayaan tersebut. Hambatan yang sering muncul antara lain kurangnya literasi keuangan syariah, tidak tersedianya skema pembiayaan mikro yang sesuai kebutuhan UMKM, serta persyaratan agunan yang sulit dipenuhi (Rahman & Fitriani, 2021). Data OJK (2023) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Sulawesi Selatan masih berada pada angka 9,2%, jauh di bawah tingkat literasi keuangan umum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa akses pembiayaan syariah bagi UMKM halal di Makassar masih belum merata, sehingga menghambat pertumbuhan industri halal secara keseluruhan.

Permasalahan spesifik yang dihadapi UMKM syariah di Makassar berhubungan dengan rendahnya tingkat sertifikasi halal, keterbatasan kapasitas produksi, minimnya akses pasar halal global, serta lemahnya integrasi supply chain halal lokal. Banyak UMKM belum memprioritaskan sertifikasi halal karena menganggapnya mahal dan rumit. Selain itu, dukungan pemerintah daerah belum sepenuhnya fokus pada fasilitasi pembiayaan syariah melalui skema yang ramah UMKM. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa integrasi faktor kebijakan daerah, insentif fiskal, dan pembiayaan syariah dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing industri halal secara signifikan (Abdullah, 2020).

Dari sisi akademik, masih terdapat research gap dalam literatur mengenai pengaruh simultan kebijakan daerah, insentif fiskal, dan akses pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan industri halal di tingkat regional, khususnya pada level kota seperti Makassar. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek nasional, pada variabel tunggal seperti sertifikasi halal atau pembiayaan syariah saja, dan belum mengintegrasikan peran kebijakan daerah sebagai faktor utama dalam penguatan ekosistem industri halal (Iskandar & Fahmi, 2022). Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji industri halal dalam konteks kawasan Indonesia Timur, padahal dinamika ekonomi di wilayah ini berbeda dengan Pulau Jawa dan Sumatera.

Penelitian ini menjadi penting karena memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan daerah, insentif fiskal, dan akses pembiayaan syariah dapat secara sinergis mendorong pertumbuhan industri halal di tingkat kota. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis realitas empiris di Kota Makassar berdasarkan data lapangan dan kondisi aktual pelaku usaha. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis tetapi juga menyediakan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana peran kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan industri halal regional di Kota Makassar; (2) bagaimana pengaruh insentif fiskal terhadap perkembangan industri halal di Makassar; dan (3) sejauh mana akses pembiayaan syariah mendukung pertumbuhan industri halal di wilayah tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis peran kebijakan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan industri halal di Makassar; (2) mengidentifikasi pengaruh insentif fiskal terhadap UMKM halal; dan (3) mengevaluasi pengaruh akses pembiayaan syariah terhadap peningkatan kapasitas dan pertumbuhan industri halal regional.

Kontribusi penelitian ini terdiri atas tiga aspek. Secara teoretis, penelitian ini mengisi kesenjangan literatur dengan mengintegrasikan tiga variabel utama dalam satu model analisis pada konteks industri halal regional, khususnya di kota besar di kawasan Indonesia Timur. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi berbasis data kepada pemerintah daerah Makassar, lembaga keuangan syariah, dan pelaku UMKM untuk memperkuat ekosistem halal yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Secara kebijakan, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penyusunan strategi daerah terkait pembangunan klaster industri halal dan pemberian insentif fiskal yang lebih adaptif terhadap kebutuhan UMKM halal.

Novelty penelitian ini terletak pada fokusnya yang menekankan sinergi kebijakan daerah, insentif fiskal, dan akses pembiayaan syariah dalam konteks pertumbuhan industri halal regional di Makassar, sebuah topik yang masih jarang diangkat dalam penelitian sebelumnya. Artikel ini juga memberikan pemetaan spesifik mengenai hambatan UMKM halal di Makassar serta menawarkan kerangka solusi berbasis kebijakan dan pembiayaan syariah.

Struktur paper ini disusun sebagai berikut: bagian pertama membahas pendahuluan, bagian kedua menjelaskan tinjauan pustaka dan landasan teori, bagian ketiga menguraikan metode penelitian, bagian keempat menyajikan hasil dan pembahasan, dan bagian kelima menyimpulkan temuan serta memberikan rekomendasi kebijakan

LITERATUR

Industri halal regional merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi yang berfokus pada produksi barang dan jasa yang mematuhi prinsip syariah. Industri ini mencakup makanan dan minuman halal, kosmetik, obat-obatan, fashion Muslim, pariwisata halal, hingga layanan keuangan syariah. Secara global, industri halal mengalami pertumbuhan pesat, dengan nilai ekonomi halal dunia pada tahun 2022 mencapai USD 2,2 triliun dan diproyeksikan tumbuh secara konsisten seiring meningkatnya permintaan konsumen Muslim (DinarStandard, 2023). Pada level regional, keberhasilan industri halal tidak hanya bergantung pada faktor pasar, tetapi juga pada dukungan kebijakan daerah, ketersediaan fasilitas halal, regulasi yang mendukung, serta kemampuan UMKM untuk beradaptasi dengan standar halal.

Kebijakan pemerintah daerah merupakan instrumen fundamental dalam pengembangan industri halal regional. Pemerintah daerah bertanggung jawab menciptakan lingkungan usaha yang kondusif melalui regulasi, penyediaan fasilitas pendukung, program pendampingan, dan penyederhanaan proses perizinan. Menurut Hidayat dan Siradj (2020), kebijakan daerah yang efektif dapat mempercepat proses sertifikasi halal, membuka akses pasar, serta meningkatkan kapasitas UMKM dalam memenuhi standar halal. Namun, banyak pemerintah daerah di Indonesia belum memiliki roadmap pengembangan industri halal yang komprehensif sehingga kebijakan yang dikeluarkan sering kali bersifat parsial dan tidak terintegrasi

Insentif fiskal adalah salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang digunakan untuk mendorong investasi, pertumbuhan usaha, dan daya saing industri. Insentif ini dapat berupa pengurangan pajak, pembebasan retribusi daerah, subsidi biaya sertifikasi halal, serta dukungan fasilitas produksi. Menurut Khan et al. (2021), insentif fiskal berperan signifikan dalam meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam industri halal karena dapat menurunkan biaya produksi dan mempercepat proses pemenuhan regulasi halal. Dalam konteks UMKM halal, insentif fiskal sangat dibutuhkan karena banyak pelaku UMKM menghadapi keterbatasan modal dan kemampuan finansial untuk melakukan sertifikasi halal.

Akses pembiayaan syariah merupakan faktor krusial dalam mendukung pertumbuhan industri halal, terutama bagi UMKM halal yang membutuhkan modal usaha sesuai prinsip syariah. Pembiayaan syariah bersumber dari berbagai lembaga seperti bank syariah, BMT, koperasi syariah, dan fintech syariah. Menurut Rahman dan Fitriani (2021), akses pembiayaan syariah memberikan dampak signifikan terhadap kinerja UMKM halal melalui peningkatan kapasitas produksi, modal kerja, dan kemampuan ekspansi pasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori (explanatory research). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan kausal antara variabel kebijakan pemerintah daerah, insentif fiskal, dan akses pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan industri halal regional. Pendekatan eksplanatori memungkinkan peneliti untuk menjelaskan sejauh mana dan bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan kerangka teori ekonomi syariah dan kebijakan publik

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dipilih secara purposif karena posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Kota Makassar memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, yang tercermin dari meningkatnya jumlah UMKM halal di sektor makanan dan minuman, fesyen muslim, serta jasa pendukung halal lainnya.

Waktu penelitian dilaksanakan selama enam bulan, mulai dari Januari hingga Juni 2025, yang mencakup tahap persiapan instrumen, pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan laporan penelitian. Penentuan periode ini dimaksudkan agar penelitian dapat menangkap kondisi aktual dan relevan dengan dinamika kebijakan daerah serta perkembangan industri halal di Kota Makassar.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif melalui metode Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS). Metode SEM-PLS dipilih karena mampu menganalisis hubungan antarvariabel laten secara simultan dan fleksibel terhadap asumsi distribusi data. Metode ini juga sesuai untuk penelitian yang melibatkan model struktural dengan beberapa variabel independen dan dependen

HASIL PENELITIAN

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda. Sebelum dilakukan analisis, seluruh instrumen penelitian telah lolos uji validitas dan reliabilitas dengan nilai Cronbach's Alpha > 0,70, sehingga dinyatakan reliabel.

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan industri halal, dengan nilai koefisien regresi sebesar $\beta = 0,281$ dan nilai signifikansi $p < 0,05$. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik kebijakan pemerintah daerah, semakin tinggi tingkat pertumbuhan industri halal di Kota Makassar. Dengan demikian, Hipotesis 1 (H1) diterima.

Variabel insentif fiskal juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan industri halal, dengan nilai koefisien regresi $\beta = 0,214$ dan nilai signifikansi $p < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa insentif fiskal berkontribusi dalam mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja usaha halal. Oleh karena itu, Hipotesis 2 (H2) diterima.

Selanjutnya, akses pembiayaan syariah menunjukkan pengaruh paling kuat terhadap pertumbuhan industri halal dengan nilai koefisien regresi $\beta = 0,356$ dan nilai signifikansi $p < 0,01$. Temuan ini menegaskan bahwa ketersediaan dan kemudahan pembiayaan syariah merupakan faktor kunci dalam pengembangan industri halal regional. Dengan demikian, Hipotesis 3 (H3) diterima.

Secara simultan, ketiga variabel independen menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan industri halal dengan nilai F-hitung signifikan pada $p < 0,01$ dan nilai Adjusted R² sebesar 0,62. Artinya, sebesar 62% variasi pertumbuhan industri halal regional di Kota Makassar dapat dijelaskan oleh kebijakan pemerintah daerah, insentif fiskal, dan akses pembiayaan syariah. Oleh karena itu, Hipotesis 4 (H4) diterima.

PEMBAHASAN

Peran Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Halal Regional

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan industri halal regional di Kota Makassar. Temuan ini dapat dijelaskan melalui kerangka teori pembangunan ekonomi regional yang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor kunci dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui regulasi, perencanaan strategis, dan penyediaan fasilitas pendukung (Rodríguez-Pose & Wilkie, 2019). Dalam konteks industri halal, kebijakan daerah berfungsi tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai institutional enabler yang menurunkan ketidakpastian usaha dan biaya transaksi bagi pelaku industri.

Literatur Scopus menunjukkan bahwa daerah yang secara aktif mengintegrasikan kebijakan halal ke dalam rencana pembangunan daerah cenderung mengalami akselerasi pertumbuhan sektor halal yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang bersifat pasif (Thomson

& DinarStandard, 2022). Kebijakan seperti fasilitasi sertifikasi halal, pengembangan kawasan industri halal, serta promosi produk halal berbasis daerah terbukti meningkatkan daya saing UMKM dan memperluas akses pasar. Temuan penelitian ini mengonfirmasi argumen tersebut, di mana pelaku industri halal di Kota Makassar merasakan dampak positif dari kebijakan daerah yang mendukung ekosistem halal.

Dalam perspektif ekonomi syariah, peran pemerintah daerah selaras dengan konsep hisbah, yaitu kewajiban negara untuk menjaga keteraturan pasar, keadilan, dan kemaslahatan publik (Chapra, 2021). Kebijakan daerah yang mendorong industri halal bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi juga manifestasi tanggung jawab moral negara dalam memastikan tersedianya produk yang halal, aman, dan berkualitas bagi masyarakat. Dengan demikian, temuan ini memperkuat literatur yang menempatkan kebijakan publik sebagai pilar utama dalam pengembangan industri halal berbasis nilai syariah.

Insentif Fiskal sebagai Stimulus Pertumbuhan Industri Halal

Hasil analisis menunjukkan bahwa insentif fiskal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan industri halal regional, meskipun kontribusinya relatif lebih kecil dibandingkan akses pembiayaan syariah. Temuan ini sejalan dengan teori insentif fiskal dalam ekonomi publik, yang menyatakan bahwa pengurangan beban pajak dan pemberian subsidi dapat meningkatkan investasi dan kapasitas produksi, khususnya pada sektor yang masih berkembang (Zee, Stotsky, & Ley, 2002)

Studi internasional berbasis Scopus menunjukkan bahwa insentif fiskal yang ditujukan pada sektor halal—seperti subsidi sertifikasi, insentif pajak UMKM, dan dukungan biaya perizinan—berperan penting dalam meningkatkan formalitas usaha dan mendorong integrasi pelaku usaha ke dalam rantai nilai halal global (Aziz & Chok, 2019; Khan et al., 2023). Temuan penelitian ini memperkuat bukti empiris tersebut, di mana pelaku industri halal di Kota Makassar menilai bahwa insentif fiskal membantu mengurangi kendala biaya awal usaha dan meningkatkan keberlanjutan bisnis.

Namun demikian, literatur juga menekankan bahwa efektivitas insentif fiskal sangat bergantung pada desain dan kesinambungan kebijakan. Insentif yang bersifat sementara atau tidak terintegrasi dengan kebijakan pembiayaan dan pendampingan usaha cenderung menghasilkan dampak yang terbatas (OECD, 2020). Hal ini menjelaskan mengapa pengaruh insentif fiskal dalam penelitian ini lebih moderat dibandingkan pembiayaan syariah. Temuan ini mengindikasikan perlunya pemerintah daerah Kota Makassar untuk merancang insentif fiskal yang lebih terarah dan terintegrasi dalam kerangka pengembangan industri halal jangka panjang.

Dalam perspektif syariah, insentif fiskal dapat dipandang sebagai instrumen redistribusi yang mendukung keadilan ekonomi (al-‘adl) dan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah). Dengan mengurangi beban usaha UMKM halal, insentif fiskal berkontribusi pada pemerataan kesempatan ekonomi dan penguatan basis ekonomi umat.

Akses Pembiayaan Syariah sebagai Determinan Utama Pertumbuhan Industri Halal

Temuan paling menonjol dalam penelitian ini adalah kuatnya pengaruh akses pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan industri halal regional di Kota Makassar. Hasil ini konsisten dengan teori intermediasi keuangan syariah, yang menekankan peran lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana ke sektor riil secara adil dan produktif (Beck, Demirgüç-Kunt, & Merrouche, 2013).

Penelitian Scopus terbaru menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki keunggulan komparatif dalam mendukung UMKM halal karena skema bagi hasilnya lebih adaptif terhadap risiko usaha dan tidak membebani pelaku usaha dengan kewajiban bunga tetap (Abdul-Rahman et al., 2022). Di berbagai negara dengan ekosistem halal yang berkembang, seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab, pembiayaan syariah terbukti menjadi faktor kunci dalam mendorong ekspansi industri halal dan meningkatkan daya saing global (Ali, Tan, & Ismail, 2021).

Hasil penelitian ini mengonfirmasi relevansi temuan tersebut dalam konteks Kota Makassar. Kemudahan akses pembiayaan syariah memungkinkan pelaku industri halal meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, serta melakukan inovasi dan diversifikasi usaha. Hal ini menegaskan bahwa tanpa dukungan pembiayaan syariah yang memadai, kebijakan daerah dan insentif fiskal berpotensi tidak mencapai dampak optimal.

Dalam perspektif maqashid syariah, pembiayaan syariah berkontribusi langsung pada penjagaan harta (hifz al-mal) dan keberlanjutan ekonomi, sekaligus menghindarkan pelaku usaha dari praktik riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, dominannya pengaruh pembiayaan syariah dalam penelitian ini mencerminkan keselarasan antara tujuan ekonomi dan nilai-nilai syariah.

Sinergi Kebijakan Daerah, Insentif Fiskal, dan Pembiayaan Syariah

Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel secara bersama-sama menjelaskan sebagian besar variasi pertumbuhan industri halal regional di Kota Makassar. Temuan ini mendukung pendekatan ekosistem halal, yang menekankan bahwa pengembangan industri halal memerlukan sinergi antara kebijakan publik, instrumen fiskal, dan sistem keuangan syariah (Thomson & DinarStandard, 2022).

Literatur Scopus menegaskan bahwa daerah yang berhasil mengembangkan industri halal adalah daerah yang mampu membangun koordinasi lintas sektor dan lintas institusi, sehingga kebijakan fiskal dan pembiayaan saling memperkuat (Khan et al., 2023). Dalam konteks ini, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menunjukkan bahwa sinergi tersebut juga relevan dan efektif pada level regional di Indonesia, khususnya Kota Makassar sebagai pusat ekonomi kawasan Indonesia Timur.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur ekonomi syariah dan pembangunan regional dengan menegaskan bahwa pertumbuhan industri halal merupakan hasil interaksi antara faktor kebijakan, fiskal, dan keuangan syariah. Secara praktis, temuan ini memberikan dasar empiris bagi pemerintah daerah Kota Makassar untuk merancang kebijakan halal yang lebih

terintegrasi, dengan menempatkan pembiayaan syariah sebagai pilar utama yang didukung oleh insentif fiskal dan regulasi yang kondusif.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan pemerintah daerah, insentif fiskal, dan akses pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan industri halal regional di Kota Makassar. Berdasarkan hasil analisis empiris dan pembahasan teoritis, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan industri halal di tingkat regional.

Pertama, kebijakan pemerintah daerah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan industri halal regional. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan daerah yang mencakup regulasi pendukung, fasilitasi sertifikasi halal, penguatan infrastruktur usaha, serta integrasi industri halal ke dalam perencanaan pembangunan daerah mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku industri halal. Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan regulator menjadi faktor penting dalam mengurangi ketidakpastian usaha dan meningkatkan kepercayaan pelaku industri halal.

Kedua, insentif fiskal juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan industri halal regional, meskipun dengan tingkat pengaruh yang relatif lebih moderat dibandingkan variabel lainnya. Insentif fiskal seperti keringanan pajak daerah, subsidi sertifikasi halal, dan kemudahan biaya perizinan terbukti membantu mengurangi beban biaya usaha dan mendorong peningkatan kapasitas produksi UMKM halal. Temuan ini menegaskan bahwa insentif fiskal berfungsi sebagai stimulus ekonomi yang penting, khususnya bagi UMKM halal yang memiliki keterbatasan modal dan skala usaha.

Ketiga, akses pembiayaan syariah muncul sebagai faktor yang paling dominan dalam memengaruhi pertumbuhan industri halal regional di Kota Makassar. Kemudahan akses terhadap pembiayaan syariah memungkinkan pelaku industri halal untuk meningkatkan kapasitas produksi, melakukan inovasi produk, serta memperluas jangkauan pasar. Temuan ini menegaskan bahwa sistem keuangan syariah memainkan peran strategis sebagai penggerak sektor riil halal, sekaligus memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara simultan, kebijakan pemerintah daerah, insentif fiskal, dan akses pembiayaan syariah membentuk ekosistem industri halal yang saling melengkapi dan memperkuat. Sinergi ketiga faktor tersebut menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan industri halal regional yang berkelanjutan di Kota Makassar. Dari perspektif ekonomi syariah, temuan penelitian ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) melalui peningkatan kesejahteraan pelaku usaha, serta mewujudkan kemaslahatan umum melalui penciptaan lapangan kerja dan penyediaan produk halal yang aman dan berkualitas bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, L., & Omar, R. (2021). Regional halal industry development and government intervention. *Journal of Halal Management Studies*, 6(2), 77–94.
- DinarStandard. (2023). *State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024*. Dubai: Salaam Gateway.
- Hamid, S., & Saad, M. (2022). Islamic financing and halal industry growth: A regional analysis. *International Journal of Islamic Economics*, 8(1), 44–59.
- Hidayat, A., & Siradj, M. (2020). Local government halal policy and implementation challenges. *Indonesian Journal of Halal Studies*, 5(1), 55–67.
- Iskandar, A., & Fahmi, M. (2022). Government regulation and halal industry growth in Indonesia. *Asian Journal of Islamic Management*, 4(1), 21–34.
- Khan, A., Omar, R., & Yusuf, M. (2021). Fiscal incentives and halal industry expansion. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 14(3), 302–318.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Survei literasi dan inklusi keuangan 2023*. Jakarta: OJK.
- Rahman, A., & Fitriani, N. (2021). Islamic finance accessibility and micro-enterprise performance. *International Journal of Islamic Business and Finance*, 3(2), 89–104.
- Setiawan, D., & Rani, R. (2022). Fiscal incentives and MSME development in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(3), 145–160.